

# SOSIALISASI & IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN

## ZONA INTEGRITAS ROSID II DAN BKSAP MENUJU WBK-WBBM

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

Selasa, 25 Juni 2019

Setyanta Nugraha, Inspektur Utama





## Nilai-nilai Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Salah satu variabel yang berhubungan dengan penentuan peningkatan kinerja organisasi adalah “**budaya organisasi**”.

Budaya organisasi adalah **norma perilaku dan nilai-nilai** yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai **dasar dalam aturan perilaku** dalam organisasi tersebut.

**R  
A  
P  
I**



### Religius

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain (Suparlan, 2010).



### Akuntabel

Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.



### Profesional

Menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatannya..



### Integritas

Memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat, Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.



# HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM)



## Unit Percontohan

1. Dianggap sebagai unit kerja yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan RB yang cukup tinggi



Merupakan **MINIATUR** pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja



Bertujuan membangun program RB, sehingga mampu mengembangkan *budaya kerja* birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.



Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju WBK dan WBBM



# PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

## Pencanangan ZI

- Penandatanganan pakta integritas
- Pernyataan komitmen

2 November 2015

## Pengusulan ZI

- Penilaian mandiri oleh TPI Inspektorat Utama
- Pengusulan ke Kementerian PANRB Inspektorat Utama

18 Juni 2019

## Penetapan WBK/WBBM

- Panel TPN
- Kementerian PAN RB bersama KPK dan Ombudsman menetapkan bersama

September 2019

## Pembangunan ZI

- Menetapkan unit kerja BiRosid II & BKSAP
- Membangun dan melakukan monev atas pembangunan Inspektorat Utama

## Reviu oleh TPN

- Verifikasi di lapangan
- Survey oleh BPS



# 5 Langkah Utama Membangun ZI

1



## KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama

2



## KEMUDAHAN PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitality untuk kepuasan publik (**Dewan**)

3



## PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT (**Dewan**)

Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat (**Dewan**) sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut

4



## MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya

5



## MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat (**Dewan**)



# PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA

## Pengajuan Zona Integritas



Mandatory

**BIRO PERSIDANGAN II**

SK NO 275/SEKJEN/2017



Mandiri

**BIRO K S A P**

KEPUTUSAN RAPAT 15 April 2019



**SUBMIT 18 Juni 2019**

**INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI**



Mandiri

# PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA

## Syarat Pengajuan Zona Integritas

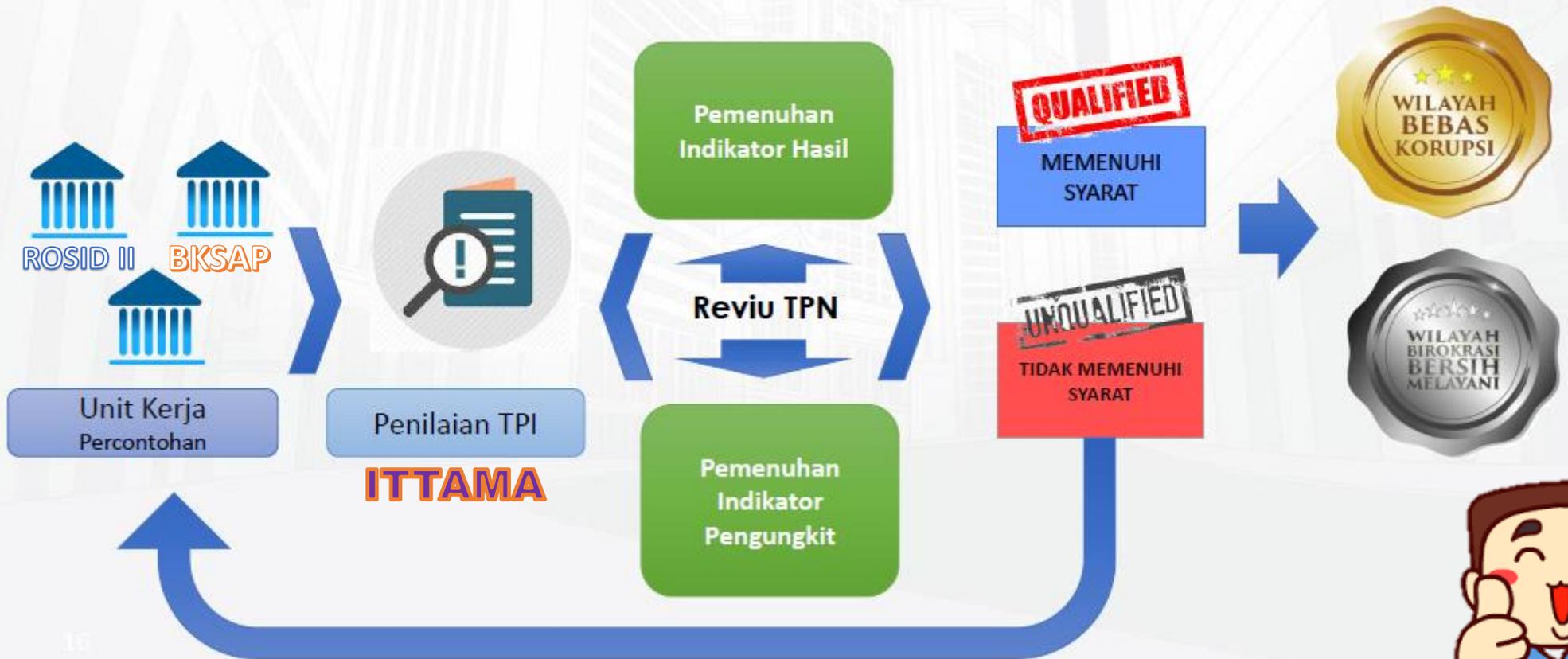
Permenpan  
52/2014

2019

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

# PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS





Mandatory



Mandiri

# PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK DAN WBBM

## PERMENPANRB 52/2014

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal	75	85
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18	18
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5	13,5
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	3,5	3,5
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	-	16

## 2019

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,88
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5 (survey 3,60)	13,88 (survey 3,70)
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	15 (survey 3,00)	17 (survey 3,40)



# PENILAIAN ZONA INTEGRITAS BIRO PERSIDANGAN II DAN BIRO KSAP

## PENGUNGKIT

### MANAJEMEN PERUBAHAN

Upaya Unit Kerja dalam merubah mind set dan budaya organisasi memiliki budaya kerja yang bersih dan melayani

### MANAJEMEN SDM

Upaya Unit Kerja dalam mengelola SDM dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM

### PELAYANAN PUBLIK

Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi menjadi lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat

### TATA LAKSANA

Upaya Unit Kerja dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja

### AKUNTABILITAS

Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

### PENGAWASAN

Upaya Unit Kerja dalam memastikan seluruh anggota unit kerja melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan bebas penyimpangan.

## HASIL

### PEMERINTAH BERSH DAN BEBAS KKN

- Survey persepsi anti Korupsi
- Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan/Pengawasan

### KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Survey Persepsi Pelayanan Publik

## WBK

1. Survey anti Korupsi 90%
2. Tindak lanjut temuan 70%
3. Nilai Total Min 75

## WBBM

1. Survey anti Korupsi 90%
2. Tindak lanjut temuan 70%
3. Survey kualitas Pelayanan 80%
4. Nilai Total Min 85



# HASIL PENILAIAN TPI

## BIRO PERSIDANGAN II

PENILAIAN		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	
<b>A.</b>	<b>PROSES (60)</b>					
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	5,0		5,00	100,00%	
II.	PENATAAN TATALAKSANA (5)	5,0		4,34	86,80%	
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15,0		12,76	85,07%	
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10,0		10,00	100,00%	
V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	15,0		12,43	82,88%	
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,0		8,12	81,19%	
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>60,0</b>		<b>52,65</b>	<b>87,75%</b>	
<b>B.</b>	<b>HASIL (40)</b>					
I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20,0		18,50	93%	
1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	0-4	3,6	13,50	90,00%
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,0	0-100%	100	5,00	100,00%
II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	20,0		17,15	86%	
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	0-4	3,43	17,15	85,75%
<b>TOTAL HASIL</b>		<b>40,0</b>		<b>35,65</b>	<b>89,13%</b>	
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>				<b>88,3005</b>		

## BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

PENILAIAN		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	
<b>A.</b>	<b>PROSES (60)</b>					
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	5,0		4,48	89,55%	
II.	PENATAAN TATALAKSANA (5)	5,0		4,00	80,00%	
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15,0		14,03	93,53%	
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10,0		10,00	100,00%	
V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	15,0		11,31	75,41%	
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,0		6,11	61,11%	
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>60,0</b>		<b>49,93</b>	<b>83,22%</b>	
<b>B.</b>	<b>HASIL (40)</b>					
I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20,0		18,50	93%	
1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	0-4	3,6	13,50	90,00%
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,0	0-100%	100	5,00	100,00%
II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	20,0		17,15	86%	
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	0-4	3,43	17,15	85,75%
<b>TOTAL HASIL</b>		<b>40,0</b>		<b>35,65</b>	<b>89,13%</b>	
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>				<b>85,58</b>		



# REKOMENDASI

## ROSID II

1. Membuat Pedoman Penilaian Kinerja Individu di lingkungan Biro Persidangan II
2. Membuat Pedoman *Reward and Punishment* di Lingkungan Biro Persidangan II.
3. Menyelesaikan tindak lanjut temuan dari BPK ataupun dari Internal Inspektorat Utama yang terdapat di Biro Persidangan II.
4. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) & Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Persidangan II.
5. Membuat Pedoman Survey Kepuasan Layanan dan hasilnya akan dipublikasikan.

## BKSAP

1. Menyelesaikan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP);
2. Penyusunan Pedoman penilaian individu di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP);
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP);
4. Membuat Pedoman *Reward* dan *Punishment* di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP);
5. Membuat Pedoman Survei Kepuasan di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP);
6. Menyelesaikan tindak lanjut temuan dari BPK ataupun Inspektorat Utama yang terdapat di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP);
7. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).



# SUBMIT

Selamat Datang



ID Pengguna

---

Sandi

---

Masuk Aplikasi

© 2018

**ZONA Integritas** Cari Formulir Keluar Aplikasi

**Upload Dokumen**

Tahun Anggaran: 2019

Choose File No file chosen Unggah

**Daftar Evaluasi**

Show 10 entries Search:

Nama file	Tahun Anggaran	Waktu Unggah	Pilihan
petunjuk_pemakaian_stonline.pdf	2018	Saturday, 09 February 2019	 
tes.pdf.pdf	2019	Tuesday, 12 February 2019	 
Nama file	Tahun Anggaran	Waktu Unggah	Pilihan

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Permohonan reviu pembangunan ZI kepada TPN menggunakan PMP-ZI melalui alamat website

[www.pmpzi.menpan.go.id](http://www.pmpzi.menpan.go.id)

**Paling lambat 31 Mei 2019**  
**18 JUNI 2019**

Tujuan:

Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.

# Terima Kasih



INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI